

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi telah mampu mendukung penataan kawasan perkotaan menjadi lebih tertata dan terorganisir. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait kondisi kawasan *Food Colony* yang belum ramai pengunjung sehingga berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai temuan pada masing-masing indikator berikut:

1. Indikator efektivitas, kebijakan relokasi PKL ke kawasan *Food Colony* dinilai telah cukup efektif dalam mendukung penataan dan ketertiban kawasan perkotaan. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas PKL di trotoar dan badan jalan yang sebelumnya dinilai mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Dengan dipusatkannya para pedagang di kawasan *Food Colony*, kondisi lingkungan perkotaan menjadi lebih tertata dibandingkan sebelum relokasi dilakukan. Akan tetapi, efektivitas kebijakan dalam mendukung keberlangsungan usaha para pedagang masih belum optimal.

Kondisi kawasan *Food Colony* yang masih sepi pengunjung menyebabkan aktivitas jual beli belum berjalan secara maksimal sehingga sebagian pedagang mengalami penurunan omzet setelah direlokasi.

2. Indikator efisiensi, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas usaha para pedagang di kawasan *Food Colony*. Fasilitas tersebut meliputi kios, area parkir, fasilitas sanitasi, serta penataan kawasan yang lebih terorganisir dibandingkan lokasi sebelumnya. Namun demikian, hasil yang diperoleh para pedagang dinilai masih belum sebanding dengan fasilitas yang telah disediakan. Kondisi kawasan yang masih sepi menyebabkan aktivitas ekonomi para pedagang belum berkembang secara optimal sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh para pedagang masih belum sesuai dengan harapan.
3. Indikator kecukupan, kebijakan relokasi dinilai telah cukup dalam menyediakan tempat usaha yang lebih layak sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas dasar yang dapat digunakan oleh para pedagang untuk menjalankan aktivitas usaha di kawasan *Food Colony*. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan para pedagang dalam meningkatkan aktivitas usaha dan pendapatan. Kondisi kawasan yang belum ramai pengunjung menyebabkan para pedagang masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha setelah direlokasi.

4. Indikator perataan, pemerintah daerah telah berupaya memberikan perlakuan dan fasilitas yang relatif sama kepada seluruh pedagang yang direlokasi ke kawasan *Food Colony*. Hal tersebut terlihat dari penyediaan kios dengan ukuran yang relatif seragam, penggunaan fasilitas umum secara bersama, serta kebijakan penggunaan kios tanpa biaya sewa bagi seluruh pedagang. Selain itu, proses penempatan pedagang dilakukan berdasarkan pendataan tanpa membedakan latar belakang pedagang tertentu. Meskipun demikian, manfaat ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang masih belum sepenuhnya merata karena beberapa pedagang menilai bahwa letak kios turut memengaruhi tingkat kunjungan pembeli.
5. Indikator responsivitas, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya responsif terhadap berbagai keluhan dan kebutuhan para pedagang melalui komunikasi, mediasi, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan di kawasan *Food Colony*. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan keramaian kawasan melalui pelaksanaan bazar dan kegiatan tertentu seperti bazar Hari Jadi Pamekasan, Hari Koperasi, kegiatan Ramadan, serta peringatan Hari Kemerdekaan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, sebagian pedagang menilai bahwa tindak lanjut yang diberikan masih belum mampu mengatasi permasalahan utama yang mereka hadapi, terutama terkait kondisi kawasan yang masih sepi pengunjung.
6. Indikator ketepatan, kebijakan relokasi PKL ke kawasan *Food Colony* dinilai tepat dari sisi penataan dan ketertiban kawasan perkotaan. Penyediaan lokasi

khusus bagi para pedagang juga dinilai penting agar proses penertiban tetap memberikan ruang usaha bagi PKL untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Akan tetapi, dari sisi keberlangsungan usaha para pedagang, kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya tepat karena kondisi kawasan *Food Colony* yang belum ramai menyebabkan aktivitas jual beli belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut juga memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung karena suasana kawasan dinilai masih kurang hidup dan pilihan kuliner yang tersedia semakin terbatas.

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan telah mampu mendukung penataan kawasan menjadi lebih tertib dan terorganisir. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama kondisi kawasan yang belum ramai pengunjung sehingga aktivitas usaha para pedagang belum berjalan optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat meningkatkan upaya pengembangan kawasan *Food Colony* agar lebih ramai dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung, seperti melalui penyelenggaraan kegiatan atau event secara rutin, promosi yang lebih optimal, serta evaluasi

berkala terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperhatikan kondisi dan penataan kios agar seluruh pedagang memperoleh kesempatan yang lebih merata dalam mendapatkan pengunjung.

2. Para pedagang diharapkan dapat melakukan inovasi menu, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memanfaatkan media sosial dan platform layanan pesan-antar makanan sebagai sarana promosi guna meningkatkan daya dan menjangkau lebih banyak konsumen.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai evaluasi kebijakan dengan mengkaji lebih banyak aspek ataupun menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, efektivitas, serta dampak dari suatu kebijakan. Selain itu, melalui evaluasi juga dapat diketahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat menjadi bahan masukan, kritik, dan saran bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.